

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan atau kredit merupakan ruh, nafas, dan spirit sebuah bank. Tanpa pembiayaan atau kredit, bank akan stagnan dan tidak berarti apa-apa. Mengacu pada UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 dan 12, yang dimaksud dengan kredit dalam perbankan konvensional adalah pembiayaan dalam perbankan syariah. Menurut Kasmir (2008), “Perbedaan kredit dan pembiayaan yang diberikan masing-masing bank terletak pada keuntungan yang diharapkan. Jika perbankan konvensional keuntungannya diperoleh dari bunga, sedangkan bank syariah keuntungannya di peroleh melalui imbalan berupa bagi hasil”.

Fungsi utama pembiayaan ada dua, yaitu: 1) memenuhi kebutuhan masyarakat. 2) menghindari pengendapan uang (Karim, 2006:105). Pembiayaan muncul sebagai wujud perintah Allah di dalam surah Al Baqarah ayat 275 :

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

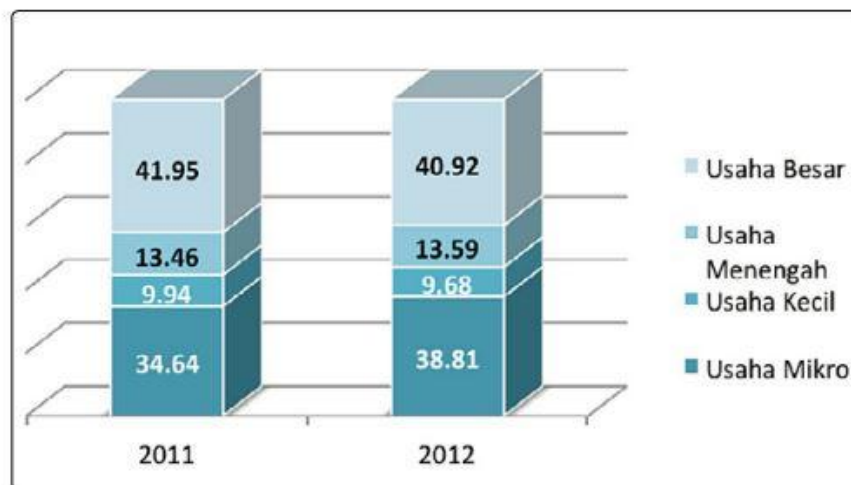
wa aḥalla ‘l-Lāhu ‘l-bai’a wa ḥarrama ‘r-ribā ...

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
Ayat di atas merupakan dasar di perbolehkannya pembiayaan, karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa perbankan syariah memperoleh keuntungan melalui imbalan berupa bagi hasil, bagi hasil itu sendiri merupakan hasil dari perdagangan. Sehingga pembiayaan menjadi halal karena dihalalkannya jual beli, sebagaimana yang di jelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 275.

Perbankan syariah memiliki komitmen untuk mendukung sektor riil, oleh karena itu sebagian besar akad yang digunakan dalam perbankan syariah berfokus pada sektor riil, sedangkan perbankan konvensional lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya pada sektor keuangan terutama dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia), dan obligasi pemerintah. Perbankan konvensional

enggan melakukan ekspansi kredit karena pembiayaan UMKM memiliki risiko yang tinggi (Hadinoto, 2007:171)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012 (BPS, 2012).



Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014

Grafik 1.1

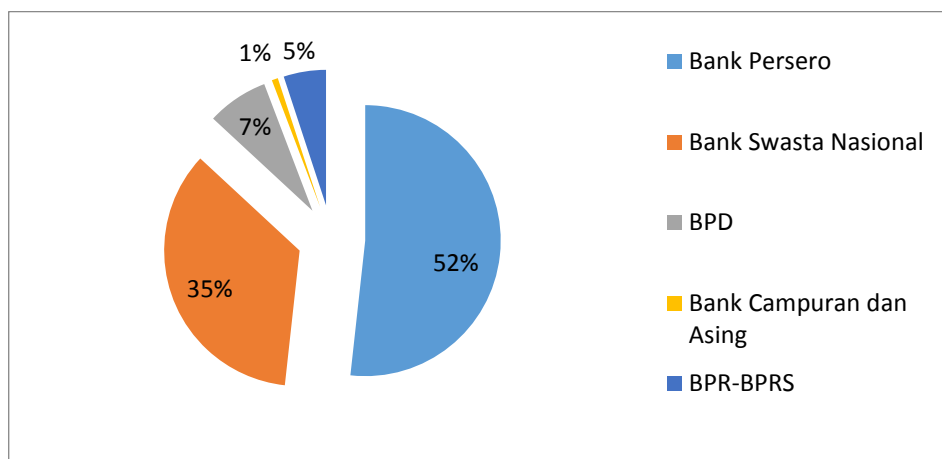
Perkembangan Usaha Besar dan UMKM (Persen) Tahun 2011 – 2012

Berdasarkan Grafik 1.1 selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada tahun 2011, usaha besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar 1,03%. Pada UMKM terjadi sebaliknya. Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%, pada tahun 2012 mencapai 13,59%. Ada peningkatan sebesar 0,13%. Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011. Pada

tahun itu mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, bila tahun 2011 hanya mencapai 34,64%, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17%. Itulah sebabnya peran UMKM begitu besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya kontribusi terhadap produk domestik bruto.

Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. Karena sekitar 60 - 70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan. Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. Perbankan pun mulai agresif menyalurkan kredit kepada UMKM. Terbukti, penyaluran kredit ke sektor UMKM lambat laun mengalami pertumbuhan. Secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan total kredit perbankan.

Grafik 1. 1
Penyaluran Kredit UMKM Tahun 2018

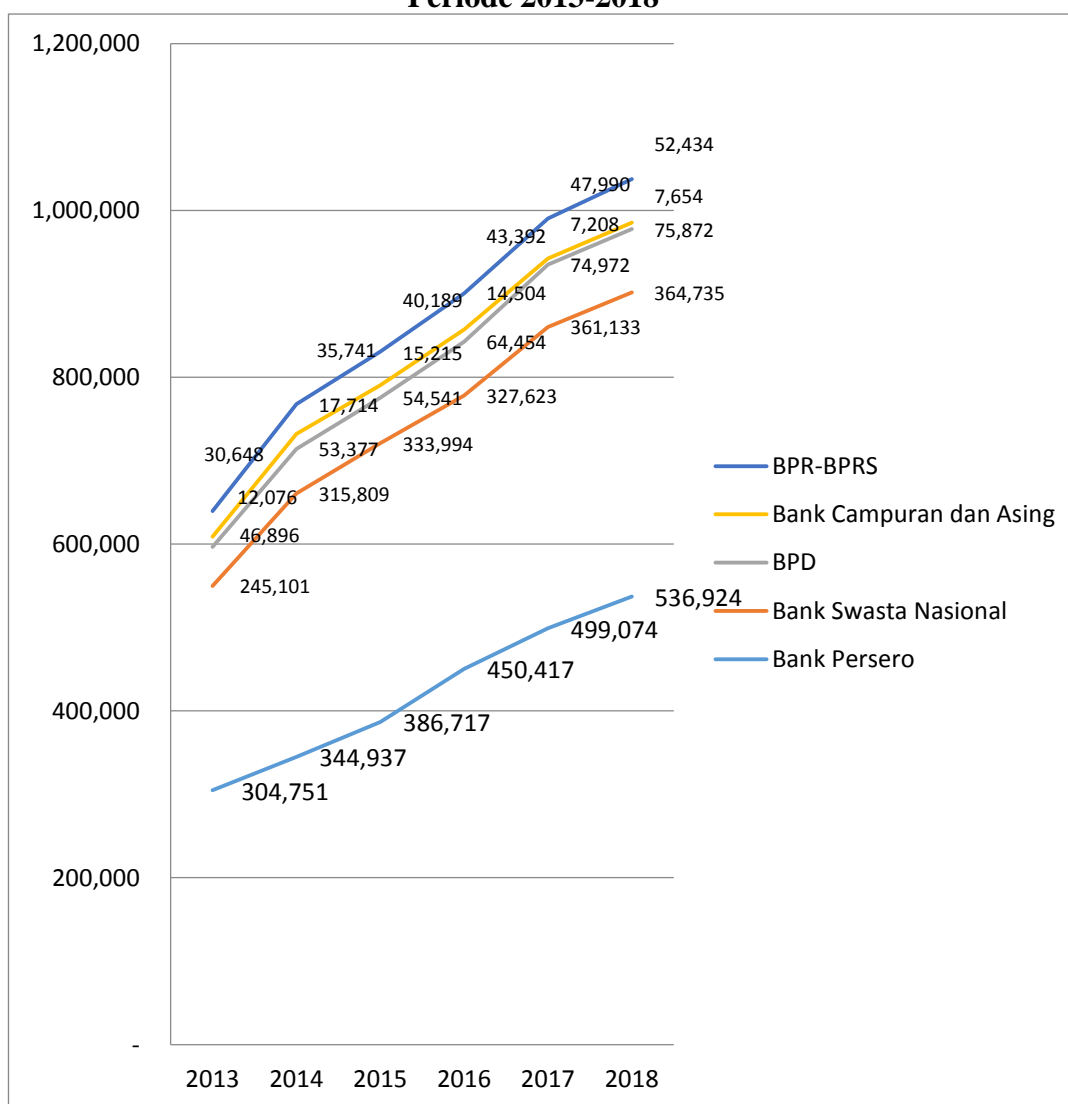


Sumber : Bank Indonesia (Sudah diolah)

Gambar 1.2 di atas merupakan data tahun 2018 menjelaskan mengenai penyaluran kredit perbankan. Porsi terbesar masih dipegang oleh Bank Persero, yaitu sebesar 50%, sementara Bank Swasta Nasional sekitar 40%, BPD 7% dan Bank Asing serta Campuran sekitar 3%.

Sementara bila kita lihat dari tahun 2013 hingga tahun 2018, berdasarkan Gambar 1.2., terlihat jelas terjadi peningkatan secara signifikan penyaluran kredit yang dilakukan perbankan kepada UMKM. Kenaikan kredit UMKM rata-rata mencapai 13.63% per tahun.

Grafik 1. 2
Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Umum
Periode 2013-2018



Sumber : Bank Indonesia (Sudah diolah)

Dari dua data tersebut kita bisa melihat, perhatian perbankan terhadap UMKM semakin baik tiap tahunnya. Namun demikian, perbaikan harus terus menerus menjadi perhatian. Tidak hanya dari sisi kuantitas nilai kredit yang harus

ditingkatkan, namun dari sisi kualitas pun perlu diperhatikan. Karena harus diakui, dari seluruh bank yang menyalurkan kredit, tidak semuanya memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai mengenai UMKM. Ada beberapa bank selama ini hanya fokus kepada penyaluran kredit korporasi. Padahal diketahui bahwa UMKM yang menyerap jumlah tenaga kerja dan berkontribusi pada PDB paling banyak ketimbang usaha besar.

Tabel 1. 1
Perbandingan UMKM dan UB

Pelaku Ekonomi	Komposisi Pelaku	Serapan Tenaga Kerja	Kontribusi Terhadap PDB	Distribusi Pembiayaan Perbankan
Usaha Besar	0,01%	3,00%	38,93%	80%
UMKM	99,99%	97,00%	61,07%	20%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2018) dan Statistik Kredit UMKM, Bank Indonesia (2018)

Dari sisi kuantitas, Bank Sentral telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. PBI tersebut mengamanatkan kepada bank agar pada tahun 2015 memberikan porsi kredit sekurang-kurangnya 5% kepada UMKM dari total kredit atau pembiayaan yang dikucurkan. Bahkan pada tahun 2018 rasio kredit atau pembiayaan terhadap UMKM ditetapkan paling rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan. Kemudian dari sisi kualitas, pelaku perbankan harus memahami profi bisnis UMKM secara lebih mendalam sehingga penyaluran kredit tepat sasaran dan menghasilkan kredit yang berkualitas baik dan lancar.

Dewasa ini, terjadi perubahan pada paradigma bisnis perbankan. Jika di era masa lalu perbankan memusatkan penyaluran dana pada segmen korporasi karena dianggap lebih cepat dan lebih besar dalam memperoleh keuntungan, maka dalam beberapa tahun belakangan ini perbankan mengarahkan penyaluran dana bank pada segmen UMKM. Hal ini karena UMKM dianggap sebagai sektor

usaha yang paling tahan terhadap krisis dan telah dibuktikan pada saat krisis di tahun 1997. Kala itu UMKM-lah yang dianggap sebagai penopang dan penyelamat perekonomian. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman krisis yang telah lalu, maka beberapa bank di Indonesia mulai mengalihkan perhatian mereka ke UMKM.

Masduki (2020), selaku Menteri Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan, “Dalam rangka meningkatkan nilai konsumsi produk UKM, serta mendukung visi misi Presiden Joko Widodo dalam menjadikan sektor UMKM sebagai *buffer* perekonomian maka Kementerian Koperasi dan UMKM telah menyiapkan tiga strategi rencana kerja tahun 2020”. Adapun tiga pilar strategi nasional Kementerian Koperasi dan UMKM, yaitu

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi UKM,
- 2) Membangun lembaga keuangan yang aman bagi UKM,
- 3) Koordinasi lintas sektor

Dari tiga pilar strategi nasional Kementerian Koperasi dan UMKM, dapat disusun enam program strategis, yaitu : 1) perluasan akses pasar, 2) meningkatkan daya saing produk dan jasa, 3) pengembangan kapasitas dan manajemen SDM usaha, 4) akselerasi pembiayaan dan investasi, 5) kemudahan dan kesempatan berusaha, 6) koordinasi lintas sektor.

Pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis, dan pada saat itu pulalah UMKM menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian. Apabila sektor selain UMKM terguncang karena adanya krisis, justru hanya UMKM lah yang tetap mampu berdiri kokoh. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data di BPS, dimana pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidaklah berkurang justru mengalami peningkatan terus menerus. Bahkan UMKM mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012, adanya UMKM menjadi wadah bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang sangat efisien dan bersifat padat karya, kegiatan ini tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan (Adnan, 2016).

UMKM merupakan unit usaha yang dapat bertahan bahkan berkembang walaupun dalam keadaan krisis ekonomi, hal ini karena beberapa alasan, antara

lain: 1) sebagian besar UMKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank. Implikasi pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap UMKM. 2) Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjaannya, sehingga mengakibatkan terjadinya pengangguran. Para penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha berskala kecil, sehingga jumlah UMKM meningkat (Pratomo & Soejodono, 2002 :14)

Pada tahun 2017, UMKM mampu berkontribusi sebesar 60% terhadap total PDB Indonesia yaitu sebesar Rp. 8.100 triliun. Angka Rp. 8.100 triliun didapatkan dari Usaha Mikro Rp. 5000 triliun, Usaha Kecil Rp. 1.300 triliun, Usaha Menengah Rp. 5.000 triliun, dan Usaha Besar sendiri menyumbang Rp. 5.400 triliun. Jika angka Rp. 8.100 triliun tersebut dibagi dengan jumlah unit UMKM, maka dapat diperkirakan besaran rata-rata omset atau pendapatan untuk UMKM, sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tahun 2017 (Triliun Rupiah)

Kategori Skala Usaha	Jumlah (Unit)	Persentase Unit Usaha	Total		Rata-Rata	
			Usaha Harga Berlaku (RpTriliun/ Tahun)	Persentase Kontribusi thd PDB	Pendapatan Unit (Rupiah Tahun)	Per Usaha Per
Mikro	62,106,900	98,70%	4,727,99	34,12%	76,126,646,15	
Kecil	757,090	1,20%	1,234,21	8,91%	1,630,202,485,83	
Menengah	58,627	0,11%	1,742,44	12,57%	29,720,777,116,35	
Besar	5,460	0,01%	5,136,22	37,07%	940,699,633,699,6	3
Total	62,928,077	100%	12,841	93%		

Sumber: Kemenkop UKM RI 2017, BPS.

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa produktifitas per unit usaha mengalami peningkatan sejalan dengan kategori skala usahanya. Usaha Mikro hanya memiliki rata-rata pendapatan usaha sekitar Rp76 juta per tahun atau Rp253 ribu per hari; Usaha Kecil Rp1,63 milyar per tahun atau Rp.5,4 juta per hari; dan Usaha Menengah Rp29.7 milyar per tahun atau sekitar Rp99 juta per hari. Sementara rata-rata pendapatan Usaha Besar adalah sekitar Rp941 milyar per tahun atau Rp3,15 milyar per hari (asumsi 300 hari per tahun). Hal ini berarti produktifitas Usaha Besar 12.394 kali lipat lebih besar daripada Usaha Mikro, 583 kali lipat daripada Usaha Kecil, dan 32 kali lipat daripada Usaha Menengah.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Beberapa penelitian mengenai pembiayaan UMKM telah banyak dilakukan dan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Menurut penelitian yang dilakukan Muslimin (2010), bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di kota Makasar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan yang dilakukan oleh Friyani (2018), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pembiayaan di bank kredit di bank konvensional dimana kredit bank konvensional di bank Y lebih unggul dibandingkan pembiayaan bank syariah.

Hasil penelitian mengenai pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh Muslimin (2010) sejalan dengan penelitian yang dilakukan Esti (2014). Hasil penelitian Esti, menyatakan bahwa baik Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri memiliki kriteria yang berbeda dalam membiayai UMKM namun keduanya memiliki platfond maksimum yang sama sebesar Rp. 5.000.000.000, '.

Berdasarkan permasalahan fenomena dan perbedaan dari beberapa penelitian, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Perbandingan Proporsi Pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan, antara perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan data yang ada pada tahun 2014-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah betul pernyataan bahwa proporsi pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan bank syariah di Indonesia lebih besar daripada proporsi kredit UMKM terhadap total kredit bank konvensional di Indonesia.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran proporsi pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia dan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit pada perbankan konvensional di Indonesia. Teknik pengumpulan data yaitu dengan mencari data pembiayaan perbankan konvensional dan perbankan syariah pada *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik analisis yang digunakan adalah uji *Mann Whitney*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan proporsi kredit perbankan konvensional dalam hal pembiayaan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai proporsi pembiayaan perbankan syariah menghasilkan nilai signifikansi (probabilitas) yang lebih kecil dari 0,05 artinya proporsi pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit pada perbankan konvensional di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran singkat mengenai hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian dan menjelaskan pokok penelitian yang akan diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori dan materi yang telah diperoleh selama perkuliahan maupun dari berbagai literatur lain yang dijadikan pedoman, pembahasan, dan analisis dalam skripsi ini. Selain itu, pada bab ini juga disampaikan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan penelitian yang digunakan, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum subjek dan objek penelitian, deskripsi karakteristik objek penelitian, data penelitian, validasi data, dan analisis hasil penelitian, interpretasi hasil penelitian, serta pembahasan penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan sebagai hasil jawaban atas rumusan masalah dari penelitian yang telah dilakukan, serta menampilkan saran-saran yang diperlukan oleh lembaga terkait, pemerintah negara terkait, serta sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.